



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENGEMBANGAN PARIWISATA PERBATASAN

Elga Andina

Analisis Legislatif Ahli Madya
elga.andina@dpr.go.id

Farhan Ryandi

Analisis Legislatif Ahli Pertama
farhan.ryandi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, berharap bahwa fasilitas *visa on arrival* (VOA) di gerbang imigrasi Provinsi Kepulauan Riau dapat mulai diterapkan pada bulan Juli 2024. Inisiatif ini bertujuan untuk memudahkan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kepulauan Riau, terutama karena daerah ini bertetangga langsung dengan Singapura dan Malaysia. Dengan lokasinya yang strategis, Kepulauan Riau memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata perbatasan di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menaikkan jumlah kunjungan wisman, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional.

Upayaserupa telah dilaksanakan di Papua dengan program *Cross Border Festival*. Festival tersebut diselenggarakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Republik Indonesia–Papua Nugini, Skow pada Juli tahun 2023 lalu. Program ini tidak hanya berhasil menarik banyak wisatawan tetapi juga memperkuat hubungan budaya dan ekonomi antara Indonesia dan negara tetangga.

Batam, yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu dari tiga pintu masuk utama wisman ke Indonesia. Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 10% wisman yang mengunjungi Indonesia masuk melalui Batam. Mayoritas dari mereka berasal dari Singapura (56,3%), diikuti oleh Malaysia (15,1%), China (3,5%), India (3,3%), Australia (0,7%), dan sisanya 20,4% dari berbagai negara lain. Selain Batam, Kepulauan Riau juga menerima wisman melalui Tanjung Uban, dengan porsi 1,99% dari keseluruhan kunjungan wisman ke Indonesia pada bulan Maret 2024.

Menurut data dari BPS, wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan menggunakan jalur laut dan darat. Pada Januari sampai April 2024, BPS mencatat 368.285 wisman masuk melalui perbatasan laut dan 306.318 melewati perbatasan darat. Pelabuhan Batam dan Tanjung Uban di Kepulauan Riau tercatat menjadi pintu masuk utama moda angkutan laut dengan kunjungan wisman terbanyak pada April 2024. Keduanya berkontribusi 82,31% atau mencapai 92,88 ribu kunjungan.

Pariwisata perbatasan, atau *cross border tourism*, merupakan program pariwisata lintas batas yang umumnya dilakukan oleh beberapa negara tetangga. Di Indonesia sendiri, konsep ini bukanlah hal yang baru. Strategi ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kabupaten di daerah perbatasan Indonesia dengan terutama menarik kunjungan wisman. Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, pengembangan pariwisata perbatasan sangat potensial karena Indonesia memiliki destinasi wisata unggulan dan konektivitas yang baik dengan negara tetangga. Pengembangan pariwisata perbatasan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara tetangga.

Pariwisata perbatasan berpotensi dikembangkan bukan saja di Kepulauan Riau, tapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Beberapa daerah potensial lainnya termasuk: (1) Provinsi Riau yang juga berbatasan dengan Malaysia dan Singapura; (2) Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Davao del Sur, Filipina; (3) Papua dengan Papua Nugini; (4) Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia; (5) Kalimantan Barat juga berbatasan dengan Serawak, Malaysia; (6) Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Tawau, Malaysia; (7) Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste; dan (8) Papua dengan Papua Nugini.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk menjalin kerja sama erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di destinasi wisata pada daerah perbatasan. Kerja sama ini krusial untuk menyukseskan program pariwisata perbatasan (*cross border tourism*) dan memastikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan mancanegara. Selain itu, Komisi X DPR RI juga perlu mengingatkan Kemenparekraf untuk memastikan pengembangan wisata yang berorientasi kualitas (*quality tourism*) alih-alih wisata berorientasi kuantitas (*quantity tourism*) atau *mass tourism* seperti yang selama ini berjalan. Hal ini merupakan titik berat dalam perubahan UU Kepariwisata yang sedang dibahas.

Sumber

Bisnis Indonesia, 3 Juli 2024;
bps.go.id, Juni 2024;
dpr.go.id, 2 Juli 2024;
kemenparekraf.go.id, 22 Maret 2023;
Kompas, 2 Juli 2024;
marketeers.com, 9 Juli 2023;
Rakyat Merdeka, 3 Juli 2024;
tempo.co, 30 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.